



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF FATKHURROKHMAN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 631369

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 399.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10.583 m²/86 m² di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m²/1 m² di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 199.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 245.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BEJ/AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, VESPA PRIMAVERA 150 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 88.350.834

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 732.350.834



III. HUTANG

Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 582.350.834

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.